

## BAB V

### KESIMPULAN

Bab ini merupakan uraian kesimpulan dari penulisan skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa Tahun 1955-1969”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Ada beberapa hal pokok yang dapat penulis simpulkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI dan RRC telah ditandatangani pada 22 April 1955, yang dituangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan dimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1959. Terbentuknya perjanjian tersebut didorong oleh kondisi yang semakin tidak menentu terhadap status etnis Tionghoa di Indonesia yang mengalami kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Sejak kemerdekaan RI, terdapat berbagai peraturan dan perundang-undangan untuk menyelesaikan status kewarganegaraan etnis Tionghoa. Sebelum tahun 1955, dimana pada waktu itu orang-orang Tionghoa yang berdomisili di Indonesia menurut peraturan kewarganegaraan dari RRC yang berazaskan *ius sanguinis*, tetap dianggap sebagai warga negara RRC, sebaliknya menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu orang Tionghoa tersebut sudah dianggap menjadi warga negara Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya perundingan antara negara RI dan RRC demi memecahkan masalah tersebut. Pada

tanggal 10 April 1969 perjanjian tersebut dicabut, karena dianggap tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan. Di satu sisi terbentuknya perjanjian tersebut telah menghilangkan status *bipatriide* bagi sebagian etnis Tionghoa, namun di sisi lain masih terdapat kekaburan kewarganegaraan di antara orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia.

*Kedua*, terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1955 serta dibatalkannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1969, menimbulkan dampak bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Baik dampak dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Asimilasi menjadi konsekuensi logis bagi etnis Tionghoa yang telah mengakui kedaulatan negara Indonesia dengan bersedia menjadi WNI dengan menggunakan prasyarat yang telah dibuat pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru berusaha menciptakan asimilasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan.

Asimilasi dalam bidang politik mulai terbuka. Peran secara individual warga Tionghoa secara politis memang tidak begitu signifikan apalagi dihadapkan pada kondisi pasang surut pemerintah RI dengan RRC, menyebabkan ruang politik warga Tionghoa masih terbatas pada organisasi bentukkan mereka sendiri yang sifatnya masih tradisional, dan bercorak ekonomi. Kebijakan pemerintah Soekarno dengan Jakarta-Peking-Pyongyang-nya dulu pun tidak berdampak cukup signifikan pada kesempatan warga Tionghoa masuk dalam jajaran kabinet maupun jabatan politis lainnya. Namun di sisi lain terdapat orang Tionghoa WNI

telah mampu turut serta secara efektif di dalam kelompok politik yang anggotanya sebagian besar WNI asli.

Loyalitas warga Tionghoa terhadap Indonesia, sudah terbukti dari sikap mereka turut dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Selain itu, cukup banyaknya warga Tionghoa yang mampu berasimilasi dalam kehidupan mereka dimasyarakat, hidup menyatu dengan masyarakat Indonesia. Mengakui kedaulatan Negara Indonesia dengan bersedia menjadi warga negara Indonesia dengan menggunakan prasyarat yang telah dibuat pemerintah. Loyalitas mereka pun nampak pada kesediaan mereka menggunakan bahasa Indonesia dan segala atribut nasional Indonesia, melakukan pendidikan yang bercampur dengan pribumi. Jadi pada masa itu yang cenderung berasimilasi lebih meluas walaupun belum dominan.

Saat ini tidak ada yang harus dikhawatirkan mengenai kondisi warga Tionghoa yang sudah puluhan tahun berdomisili di negara Indonesia. Loyalitas tidak hanya diukur dengan kemampuan mereka mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun Tionghoa menjadi sebuah unsur terpenting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia kearah perubahan dan perbaikan. Itu merupakan bagian dalam proses mengisi pembangunan di Indonesia, dari aspek politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tionghoa menjadi entitas yang utuh dalam kebudayaan Indonesia, sebagai bagian multikulturalisme dalam berbangsa dan bernegara.